



LAKIP

LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN

2023



**DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Ilahi Robbi atas berkat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 dapat terselesaikan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini, sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah serta dalam rangka perwujudan good governance berdasarkan INPRES Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.


Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini tidak lepas dari kerja keras seluruh karyawan karyawan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, untuk itu tak lupa kami ucapkan banyak terima kasih, yang telah bekerja dengan sebaik-baiknya dalam menjalankan Program dan Kegiatan selama tahun 2023 sehingga dapat dijadikan evaluasi dalam penyusunan laporan ini.

Kami sangat menyadari bahwa penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini yang merupakan evaluasi rincian pekerjaan selama satu tahun, sehingga sudah pasti banyak kekurangan, untuk itu kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi penyempurnaan kedepan.

Harapan kami dengan tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 ini kiranya dapat memberikan gambaran kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati Lombok Timur tentang pelaksanaan tugas selama tahun 2023 sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan pada tahun selanjutnya.

Selong, 29 Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR


M.ZAINUDDIN, S.Pi.M.Si
NIP. 19760701 200901 1 005
Pembina Tk.I (IV/b)

DAFTAR ISI

	Hal.
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	iv
DAFTAR GRAFIK	v
RINGKASAN EKSEKUTIF	vi
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.1.1. Dasar Hukum	1
1.2. Gambaran Umum Kab.Lombok Timur	2
1.2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi	2
1.2.2. Kondisi Topografi	2
1.2.3. Kondisi Demografi	3
1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta Struktur Organisasi	3
A. Tugas Pokok dan Fungsi	3
B. Struktur Organisasi	16
C. Permasalahan dan Solusi	21
D. Sistematika Penyajian	21
II. PERENCANAAN KINERJA	23
A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)	23
B. Rencana Strategis (RENSTRA)	25
C. Perjanjian Kinerja Eselon II	29
III. AKUNTABILITAS KINERJA ESLON II	31
A. Capaian Kinerja Organisasi	31
	36
IV. PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	39
LAMPIRAN – LAMPIRAN	40

DAFTAR TABEL

Tabel		Hal
1.	Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan serta Jenjang Pendidikan	18
2.	Data Pegawai Berdasarkan Jabatan	19
3.	Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan	19
4.	Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	19
5.	Jumlah Pegawai Sesuai Bidang Tugasnya	20
6.	Indikator Kinerja Utama	26
7.	Sasaran Program dan Kegiatan tahun 2023	27
8.	Pencapaian Kinerja Produksi Perikanan	31
9.	Perbandingan Realisasi Kinerja tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 ..	32
10.	Perbandingan Realisasi Kinerja pada Tahun 2022 dan 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2019-2023.....	33
11.	Realisasi Anggaran 2023 (DAU/DAK).....	36

DAFTAR LAMPIRAN

	Hal
1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Tahun 2023	42
2. Formulir Pengukuran Kinerja	45
3. Pencapaian Kinerja Keuangan	46
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	54

DAFTAR GRAFIK

	Hal
1. Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan	16

RINGKASAN EKSEKUTIF

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi yang di emban dari Pemerintah Daerah maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur menetapkan tujuan dan sasaran sebagai berikut:

A. Tujuan

1. Meningkatkan Produksi Perikanan

B. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai Dinas Kelautan dan Perikanan adalah:

1. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap.
2. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya.
3. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan

C. Permasalahan dan Solusi

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut diatas, permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

1. Keberadaan Data di Bidang Kelautan dan Perikanan belum memadai.
2. Penguasaan teknologi budidaya ikan yang belum optimal.
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pembudidaya ikan
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan
5. Tingginya harga pakan tidak sebanding dengan nilai harga jual ikan.
6. Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan keragaman produk olahan kelautan dan perikanan yang bernilai tambah.

Mengacu dari permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, maka upaya yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan akurasi data setiap tahun (dengan membuat buku statistik perikanan secara berkelanjutan).
2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan teknis budidaya ikan.
3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan.
4. Pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan.
5. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pembudidaya ikan tentang cara pembuatan pakan.
6. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok pengolah dan pemasar.

D. Hasil Pengukuran Kinerja

Dari hasil pengukuran kinerja selama satu tahun, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur yang didasarkan pada indikator kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, pencapaian rencana tingkat capaian/target total nilainya selama satu tahun sebesar Rp. 3.012.332.639,- (95,52 %) keuangan dan fisik (95,52 %).
2. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, pencapaian rencana tingkat capaian/target total nilainya selama satu tahun sebesar Rp. 6.156.176.000,- (88,04 %) keuangan dan fisik (100 %).
3. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, pencapaian rencana tingkat capaian/target total nilainya selama satu tahun sebesar Rp. 4.144.738.700,- (83,01 %) keuangan dan fisik (100 %).
4. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, pencapaian rencana tingkat capaian/target total nilainya selama satu tahun sebesar Rp. 1.161.269.000,- (97,19 %) keuangan dan fisik (100 %).

E. Hasil Evaluasi Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi internal, maka pelaksanaan kinerja kegiatan termasuk **Kategori Baik** dimana rata-rata pencapaian kinerja sudah mencapai sasaran yang diharapkan. Adapun realisasi keuangan dari bulan Januari - Desember mencapai Rp. 14.474.516.339,- (88,62%) dan realisasi fisik (99,14%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 16.333.882.090,- dari sumber dana (DAU/DAK).

Selong, 29 Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

M.ZAINUDDIN, S.Pi, M.Si
NIP. 19760701 200901 1 005
Pembina Tk I (IV/b)

BAB. I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan salah satu bentuk media untuk melaporkan keberhasilan atau kegagalan suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan tujuan dan sasaran organisasi. Akuntabilitas kinerja didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang mewajibkan kepada setiap instansi pemerintah melakukan akuntabilitas kinerja masing-masing sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan organisasi sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam bentuk Laporan Kinerja.

1.1.1. Dasar Hukum

Sebagaimana kita telah ketahui, Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Artinya, menyusun laporan tersebut secara “Benar” dan “Tepat” sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku adalah tanggungjawab setiap instansi pemerintah. Hal ini merujuk pada aturan-aturan yang ada sebagai dasar atau pijakan hukum antara lain, yaitu:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan tata cara reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2. Gambaran Umum Kabupaten Lombok Timur

1.2.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kabupaten Lombok Timur adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebelah timur Pulau Lombok dengan ibu kota di Selong mempunyai wilayah seluas 2.679,88 km² yang terbagi atas daratan seluas 1.605,55 km² (59,91%), dan wilayah laut seluas 1.074,33 km² (44,09%) dengan panjang pantai 220 km. Kabupaten Lombok Timur terletak antara 116^o-117^o Bujur Timur (BT dan 8^o-9^o Lintang Selatan (LS) dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Laut Flores
- Sebelah Selatan : Samudera Hindia
- Sebelah Barat : Kab.Lombok Tengah dan Kab.Lombok Utara
- Sebelah Timur : Selat Alas

Secara administratif Kabupaten Lombok Timur terdiri dari 21 Kecamatan, 15 Kelurahan dan 239 Desa (6 Kecamatan dengan 38 Desa/Kelurahan yang termasuk daerah pesisir) yang dikelilingi oleh pulau-pulau kecil (Gili) sebanyak 39 Gili, diantara gili-gili tersebut, terdapat 4 gili yang berpenghuni yaitu: Gili Maringkik, Gili Belek, Gili Ree dan Gili Ujung Betok.

1.2.2. Kondisi Topografi

Secara Topografi Kabupaten Lombok Timur terbagi menjadi 4 bagian antara lain:

1. Bagian Utara merupakan dataran tinggi, daerah pegunungan (kawasan gunung renjani) yang sebagian besar merupakan areal hutan, sedangkan kondisi pesisir pantainya landai dan berpotensi untuk pengembangan wisata bahari (terumbu karang, mangrove) dan pertambakan.
2. Bagian Tengah merupakan hamparan dataran rendah yang subur dengan dimniasi pemanfaatan adalah persawahan. Pemukiman, lokasi konsentrasi usaha-usaha pertanian dan lain-lain, dengan kondisi pesisir pantainya landau berpotensi untuk pengembangan areal pertambakan.
3. Bagian Selatan bergelombang dan berbukit-bukit, pesisir pantai landau sampai curang (tebing) dengan pasir putih, potensi untuk pengembangan perikanan dan pariwisata.
4. Bagian Timur, Utara dan Selatan yang merupakan tepian pantai memiliki ketinggian antara 0-50 m diatas permukaan laut, semakin

kebagian tengah/ kedalaman kedudukan tanah semakin meninggi hingga ke puncak gunung renjani yang mencapai ketinggian 3.775 meter.

1.2.3. Kondisi Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Lombok Timur menurut data statistik tahun 2021 sebanyak 1.343.901 jiwa yang terdiri dari laki-laki 669.907 jiwa dan perempuan 673.994 jiwa. Dari jumlah penduduk tersebut, sebanyak 383.810 jiwa (28,96%) hidup menyebar pada 48 (desa/kelurahan pantai) di 6 kecamatan pantai/pesisir antara lain Kec. Lab.Haji, Kec.Sakra Timur, Kec.Keruak, Kec.Jerowaru, Kec.Pringgabaya dan Kec.Sambelia. Sedangkan penduduk yang berusaha/bekerja di bidang Kelautan dan Perikanan antara lain nelayan sebanyak 13.712 jiwa, pembudidaya sebanyak 5.586 RTP yang terdiri dari petambak 99 RTP, pembudidaya ikan air tawar (kolam) 2.655 RTP, budidaya karamba jaring apung 1.809 RTP, budidaya minapadi 147 RTP, budidaya rumput laut 811 RTP, Pembenihan ikan 33 RTP, Budidaya Ikan Hias 32 dan pelaku usaha pengolahan hasil perikanan (Unit Pengolahan Ikan/UPI) besar menengah sebanyak 14 RTP dan UPI mikro kecil sebanyak 2.367 RTP.

Sedangkan luas lahan potensi tambak garam di Kab.Lombok Timur sebesar 1.385,13 ha yang terdiri dari lahan tidak produktif 1.091,78 ha, lahan produktif 293,35 ha, lahan produksi pugar 243,88 ha dan lahan produksi non pugar 49,47 ha. Pada kondisi cuaca normal luasan tambak garam yang ada mampu memproduksi garam sebanyak 25-30 ton/ha/siklus dengan sistem tradisional, sedangkan untuk sistem ulir dan geo membran produksi yang dihasilkan untuk satu hektar/siklus antara 60-70 ton/ha/siklus.

1.3. Tugas Pokok dan Fungsi serta struktur organisasi

A. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Pada pasal 2 dinyatakan Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Kelautan dan Perikanan yang menjadi kewenangannya kabupaten adalah sebagai berikut:

1. Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sedangkan mengenai tugas dan fungsinya diatur pada BAB III pasal 4 Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 29 tahun 2021 tersebut yaitu:

1. Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Pengelolaan Perikanan Tangkap, Pengelolaan Perikanan Budidaya, Pemberdayaan Usaha Perikanan, dan Pengelolaan UPT;
 - d. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur sesuai Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretaris Dinas; terdiri atas:
 1. Subbagian Keuangan dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap, terdiri atas:
 1. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan;
 2. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil; dan
 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil.
- d. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya, terdiri atas:
 1. Seksi Perizinan Perikanan;
 2. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan.
- e. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan, terdiri atas:
 1. Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
 2. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha; dan
 3. Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik usaha Perikanan.
- f. UPT; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional

I. Sekretariat

1. Sekretariat Dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi kesekretariatan, mengordinasikan pelaksanaan kegiatan administrasi umum, perencanaan program dan anggaran serta ketatausahaan.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekretariat Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - b. Koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
 - c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
 - d. Pengelolaan asset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat membawahi:

- a. Subbagian Keuangan dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program kerja, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring dan evaluasi.

Dalam melaksanakan tugas Subbagian Keuangan dan Pelaporan, menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan program, pengelolaan administrasi keuangan, monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan Dinas;
- Menyusun dan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
- Penatausahaan keuangan dan pengelolaan penyusunan anggaran Dinas;
- Menyiapkan data pendukung laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Menyiapkan laporan berkala bulanan, triwulan dan tahunan;
- Penyusunan pertanggungjawaban anggaran Dinas;
- Melaksanakan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan serta menyusun laporan hasil pelaksanaannya; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

b. Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan kepegawaian, organisasi tata laksana, pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik, arsip dan dokumentasi, rumah tangga dan perlengkapan, serta urusan tata usaha. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- Pengelolaan rumah tangga dan tata usaha Dinas;
- Pelaksanaan hubungan masyarakat;
- Pelaksanaan dan administrasi kepegawaian dan system informasi;
- Penyiapan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, advokasi dan analisis hukum, serta urusan dokumentasi dan informasi hukum;
- Pengelolaan layanan administrasi kepegawaian Dinas.

II. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap

a. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan penangkapan ikan, pemberdayaan nelayan kecil dan pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil.

b. Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap mempunyai fungsi sebagai berikut:

- Perumusan kebijakan pengelolaan perikanan tangkap;
- Penyusunan rencana strategis peningkatan hasil dan mutu, sarana dan prasarana pengelolaan perikanan tangkap;
- Perumusan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil dalam Daerah;
- Perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
- Perumusan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan bidang perikanan tangkap dalam Daerah;
- Pengordinasian pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan bidang perikanan tangkap dalam daerah;
- Pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang pengelolaan perikanan tangkap dalam daerah; dan
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap membawahi:

- a. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan penangkapan ikan pada sumberdaya alam yang dapat diusahakan dalam daerah. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
 - Penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan dalam daerah;
 - Penyediaan prasarana usaha perikanan tangkap;
 - Pengoordinasian pengawasan usaha perikanan tangkap di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam daerah;
 - Penjaminan ketersediaan sarana usaha perikanan tangkap; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan konsep pelaksanaan kebijakan pemberdayaan nelayan kecil;
 - Pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan nelayan kecil;
 - Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, kemitraan usaha kepada nelayan kecil; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil. Dalam melaksanakan tugas Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil menyelenggarakan fungsi:
- Penyusunan data, identifikasi dan analisis pembinaan kelembagaan dan system informasi nelayan kecil;

- Persiapan bahan perumusan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
- Melaksanakan kebijakan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil;
- Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pembinaan kelembagaan dan sistem informasi nelayan kecil; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

III. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya

- a. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan perizinan usaha di bidang pembudidayaan ikan yang usahanya berada dalam daerah.
- b. Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - Pengoordinasian pelaksanaan verifikasi izin usaha perikanan dan pembudidayaan ikan kecil yang berada di dalam Daerah;
 - Perumusan kebijakan penerbitan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang usahanya berada dalam Daerah;
 - Perumusan kebijakan pemberdayaan pembudidaya ikan kecil;
 - Perumusan kebijakan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah;
 - Perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan kegiatan pengelola perikanan budidaya; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya Membawahi:

- a. Seksi Perizinan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang usahanya berada di dalam Daerah;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Perizinan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya berada di dalam daerah yang

menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;

- Pelayanan penerbitan rekomendasi Izin Usaha Perikanan bidang pembudidayaan ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya berada di dalam Daerah yang menggunakan teknologi sederhana, semi intensif, dan intensif serta tidak menggunakan modal asing dan/atau tenaga kerja asing;
 - Penyusunan dan pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah;
 - Pelayanan penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) yang berada dalam Daerah; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- b. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan Pembudidayaan ikan kecil;
- Dalam melaksanakan tugas Seksi Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil menyelenggarakan fungsi :
- Pelaksanaan pengembangan kapasitas pembudidaya ikan kecil;
 - Pengembangan kapasitas nelayan kecil;
 - Pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pengembangan kelembagaan pembudidayaan ikan kecil;
 - Pelaksanaan fasilitasi bantuan pendanaan, bantuan pembiayaan, dan kemitraan usaha bagi pembudidaya ikan kecil;
 - Pemberian pendampingan, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi pembudidaya ikan kecil; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pengelolaan pembudidayaan ikan dan pengawasannya;
- Dalam melaksanakan tugas Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan menyelenggarakan fungsi :
- Pelaksanaan penyediaan data dan informasi pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;

- Pelaksanaan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya yang berada dalam Daerah;
- Pelaksanaan pembinaan dan pemantauan pembudidayaan ikan di darat;
- Penyusunan bahan perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
- Pelaksanaan pengawasan usaha perikanan bidang pembudidayaan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa, dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam Daerah;
- Penyusunan bahan perencanaan dan pengembangan pemanfaatan air untuk pembudidayaan ikan di darat; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

IV. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan

- a. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pemberdayaan usaha perikanan.
- b. Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :
 - Penyusunan rencana kerja Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
 - Penyusunan kebijakan penentu di Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
 - Pengoordinasian tugas dan kegiatan di lingkup Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan;
 - Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kebijakan Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan; dan
 - Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan Membawahi :

- a. Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan bina mutu pengembangan produk kelautan dan perikanan;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategis pengendalian dan pembinaan kegiatan Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
 - Penyiapan bahan dan melaksanakan bimbingan teknis Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan;
 - Penyiapan bahan pengadaan, pembinaan dan pendampingan pemanfaatan sarana dan prasarana pengembangan produk kelautan dan perikanan;
 - Penyiapan bahan pembinaan mutu, pengembangan dan pemberdayaan pelaku usaha produk kelautan dan perikanan;
 - Penyiapan bahan pembinaan dan pengembangan sentra produk hasil kelautan dan perikanan serta unit pengelolaan hasil kelautan dan perikanan;
 - Penyiapan bahan bimbingan teknis pembinaan mutu kepada petugas/pelaku usaha produk kelautan dan perikanan; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan
- b. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang akses pasar, promosi dan kemitraan usaha perikanan;

Dalam melaksanakan tugas Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategi pengendalian dan pembinaan kegiatan akses pasar, promosi dan kemitraan usaha perikanan;
- Penyiapan bahan dan melaksanakan verifikasi supplier hasil perikanan;
- Penyiapan bahan dan memverifikasi sarana dan prasarana pemasaran;
- Penyiapan bahan data potensi kebutuhan dan konsumsi ikan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan promosi produk kelautan dan perikanan serta gerakan memasyarakatkan makan ikan (Gemarikan) untuk mendapatkan akses pasar dan meningkatkan konsumsi ikan;
- Penyiapan bahan usulan Rencana Strategis, kegiatan Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha;

- Penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi; dan
 - Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.
- c. Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi, koordinasi serta pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan di bidang pendayagunaan teknologi, logistik usaha perikanan.

Dalam melaksanakan tugas Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan menyelenggarakan fungsi :

- Penyiapan bahan penyusunan kebijakan strategi pengendalian dan pembinaan kegiatan pendayagunaan teknologi dan logistik usaha perikanan;
- Penyiapan bahan bimbingan teknis penerapan teknologi dan logistik usaha perikanan;
- Pengkajian dan penerapan teknologi dan logistik usaha perikanan;
- Penyiapan sarana logistik usaha perikanan;
- Penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi, fasilitasi, monitoring dan evaluasi pelaporan pendayagunaan teknologi dan logistik usaha perikanan; dan
- Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

V. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

1. Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam bidang teknis budidaya perikanan air tawar.
2. Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam bidang teknis budidaya perikanan air payau dan laut.
3. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam kegiatan yang berkaitan dengan pelelangan ikan diwilayah kerjanya.

Fungsi Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

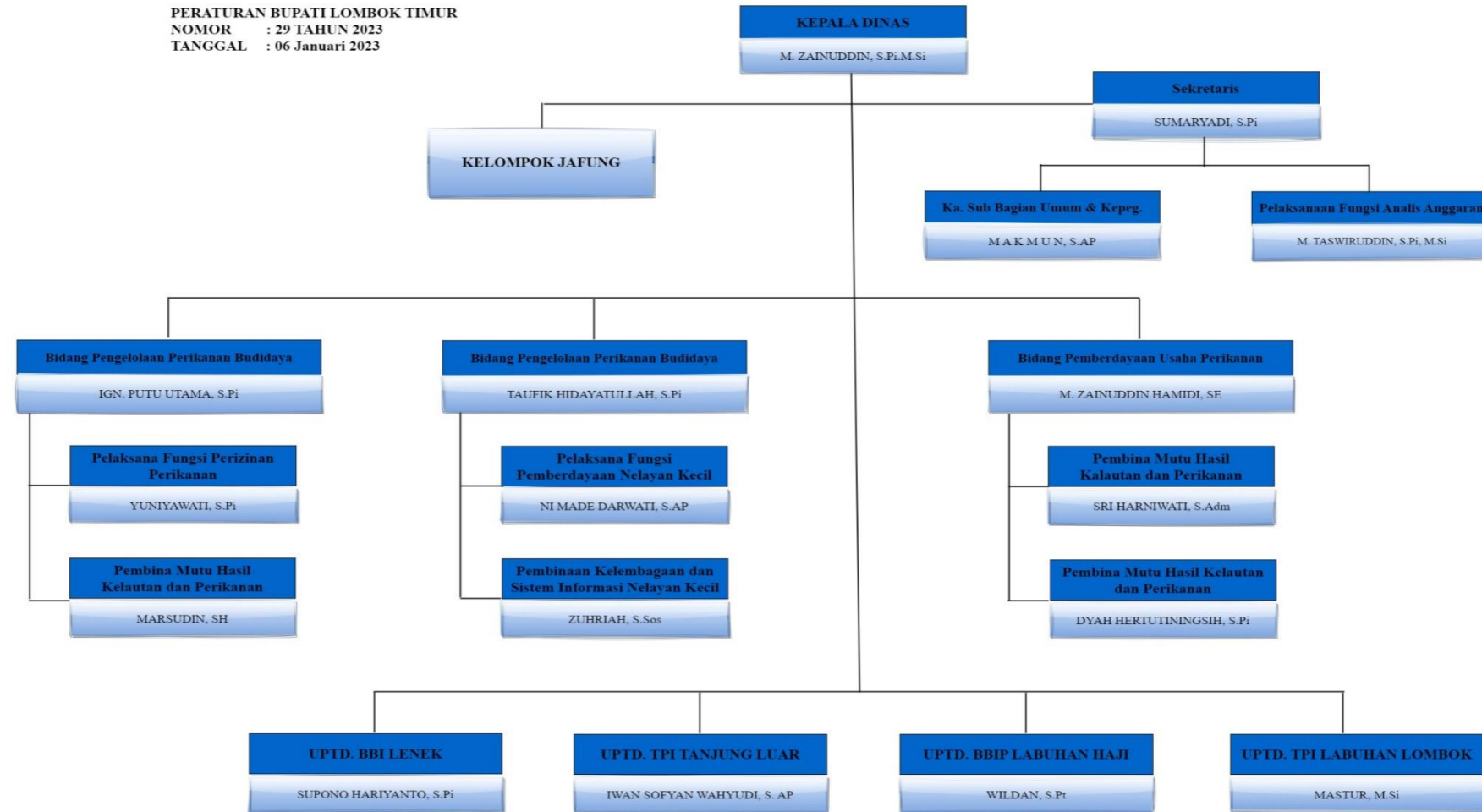
1. Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Lenek mempunyai fungsi:
 - a. Penyusunan rencana penerapan dan pengembangan teknologi budidaya air tawar.
 - b. Pengkajian dan analisis teknologi budidaya perikanan air tawar.
 - c. Pengujian dan penerapan teknologi budidaya perikanan air tawar.
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang budidaya perikanan air tawar.
 - e. Pengumpulan data teknologi budidaya perikanan air tawar yang berkembang di masyarakat sebagai data pendukung dan bahan kajian.
 - f. Penetapan rekomendasi teknologi budidaya air tawar.
 - g. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah.
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas.
 - i. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit.
 - j. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang budiday perikanan air tawar.
 - k. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian dibidang budidaya perikanan air tawar diwilayah kerjanya.
 - l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Mempunyai Tugas:
 - a. Penyusunan rencana penerapan dan pengembangan teknologi budidaya perikanan air payau dan laut;
 - b. Pengkajian dan analisis teknologi budidaya perikanan air payau dan laut;
 - c. Pengujian dan penerapan teknis dibidang budidaya perikanan air payau dan laut;
 - d. Pelaksanaan kebijakan teknis dibidang budidaya perikanan air payau dan laut
 - e. Pengumpulan data teknologi budidaya perikanan air payau dan laut yang berkembang dimasyarakat sebagai data pendukung dan bahan kajian
 - f. Penetapan rekomendasi teknologi budidaya perikanan air payau dan laut
 - g. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah;
 - h. Penyusunan laporan pelaksanaan Tugas;
 - i. Pelaksanaan pembinaan, pengwasan, pengendalian dan penilaian personil unit

- j. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang budidaya perikanan air payau dan laut;
 - k. Pelaksanaan, pengawasan dan pengendalin di bidang budidaya perikanan air payau dan laut diwilayah kerjanya;
 - l. Pelaksanaan tugas lain yng diberikanan oleh atsan sesuai dengan tugas dan fungsinya
3. Tempat pelelangan Ikan (TPI) Mempunyai Tugas:
- a. Penyusunan rencana kerja;
 - b. Pelaksanaan kegiatan pendataan pendaratan kapal dan hasil tangkapan nelayan;
 - c. Pelaksanaan kegiatan pelelangan ikan;
 - d. Penyelenggaraan fungsi administrasi perkantoran yang meliputi kepegawaian, perlengkapan, keuangan dan barang-barang daerah;
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan Tugas;
 - f. Pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian personil unit;
 - g. Pelaksanaan koordinasi dengan dinas/instansi terkait dalam bidang pelelangan ikan;
 - h. Pelaksanaan tugas lain yng diberikanan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya;

B. STRUKTUR ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN LOMBOK TIMUR

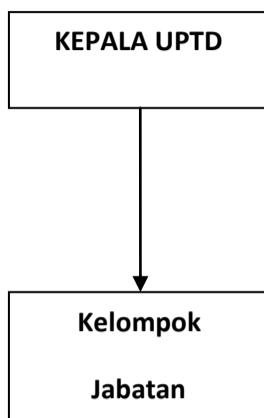


Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur

Adapun struktur organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur antara Lain:

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan
3. Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya terdiri dari:
 - a. Seksi Perizinan Perikanan
 - b. Seksi Pemberdayaan Pembudidayaan Ikan Kecil
 - c. Seksi Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dan Pengawasan
4. Kepala Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari:
 - a. Seksi Pengelolaan Penangkapan Ikan
 - b. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil
 - c. Seksi Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan
 - a. Seksi Bina Mutu, Pengembangan Produk Kelautan dan Perikanan
 - b. Seksi Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha
 - c. Seksi Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan
6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)
 - a. Balai Benih Ikan (BBI) Lokal Lenek
 - b. Balai Budidaya Ikan Pantai (BBIP) Lab.Haji
 - c. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Tanjung Luar
 - d. Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Lab.Lombok

Sedangkan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas mengacu pada Peraturan Bupati Lombok Timur Nomor 13 Tahun 2008 tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur, yaitu:



Gambar 1.2 Unit Pelaksana Teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur

Data Personil:

Tabel 1. Data Kepegawaian Berdasarkan Jabatan, Pangkat/Golongan serta Jenjang Pendidikan

No.	Jabatan Struktural/Fungsional	Jml	Pangkat/Gol.	Pendidikan Formal	Ket.
1.	Kepala Dinas	1	Pembina Tk.I (IV/b)	S2	Perikanan
2.	Sekretaris	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
4.	Kepala Bidang Perikanan Tangkap	1	Pembina (IV/a)	S1	Perikanan
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan	1	Pembina (IV/a)	S1	Akutansi
6.	Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Penata (III/c)	S1	Administrasi Pemerintahan
7.	Pelaksana Analis Anggaran Perikanan	1	Pembina Tk. I (IV/b)	S2	Ilmu Kelautan
8.	Sub Koordinator Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan Bid.Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Penata Tk. I (III/d)	S1	Hukum
9.	Pelaksana Fungsi Perizinan Perikanan Bid.Pengelolaan Perikanan Budidaya	1	Penata (III/c)	S1	PSP
10.	Sub Koordinator Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil	1	Penata Tk. I (III/d)	S1	Sosial
11.	Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Nelayan Kecil	1	Penata Tk. I (III/d)	S1	Adm. Publik
12.	Pembinaan Mutu Hasil Kelautan	1	Penata Tk. I	S1	Administrasi

	dan Perikanan/Sub Koordinator Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha		(III/d)		
13.	Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan /Subkoordinator Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan	1	Penata Tk. I (III/d)	S1	PSP
14.	Kepala BBI Lokal Lenek	1	Penata Tk.I (III/d)	S1	Perikanan
15.	Kepala BBIP Lab.Haji	1	Penata (III/c)	S1	Perternakan
16.	Kepala TPI Tanjung Luar	1	Penata (III/c)	S1	Administrasi Publik
17	Kepala TPI Lab.Lombok	1	Penata Tk.I (III/d)	S2	Teknik Budidaya
	Jumlah	17			

Tabel 2. Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah (Orang)
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris	1
3.	Kepala Bidang	3
4.	Sub Koordinator	4
5	Analisis Anggaran	1
6.	Kepala Sub.Bagian	1
7.	Kepala UPTD	4

Tabel 3. Data Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No.	Pangkat/Golongan	Jumlah (Orang)
1.	Pembina (IV)	6
2.	Penata (III)	13
3.	Pengatur (II)	2
4.	Ahli Pertama (IX)	2

Tabel 4. Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	Strata II (S2)	3
2.	Strata I (S1)	18

3.	DIII	0
4.	SLTA	2

Tabel 5. Jumlah Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur sesuai Bidang Tugas

No.	Bidang Tugas	Eselon						Staf		Jumlah	
		II		III		IV		L	P	L	P
		L	P	L	P	L	P				
1.	Kepala Dinas	1								1	
2.	Sekretaris			1						1	
3.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya			1						1	
4.	Kepala Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap			1						1	
5.	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Perikanan			1						1	
6.	Kepala Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian					1				1	
7.	Pelaksana Analisis Anggaran Perikanan					1				1	
8.	Pelaksana Fungsi Perizinan pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya						1				1
9.	Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan pada Bidang Pengelolaan Perikanan Budidaya					1				1	
10.	Sub Koordinator Pembinaan Kelembagaan dan Sistem Informasi Nelayan Kecil						1				1
11.	Pelaksanaan Fungsi Pemberdayaan Nelayan Kecil						1				1
12.	Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan /Sub Koordinator Akses Pasar, Promosi dan Kemitraan Usaha						1				1
13.	Pembinaan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan /Subkoordinator Pendayagunaan Teknologi dan Logistik Usaha Perikanan						1				1
14.	Kepala BBI Lokal Lenek					1				1	
15.	Kepala BBIP Lab.Haji					1				1	

16	Kepala TPI Tanjung Luar					1				1	
17	Kepala TPI Lab.Lombok					1				1	
18.	Staf							4	2	4	2
JUMLAH										16	7

C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah:

1. Keberadaan Data di Bidang Kelautan dan Perikanan belum memadai
2. Penguasaan Teknologi Budidaya Ikan yang belum optimal
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana pembudidaya ikan
4. Masih kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki nelayan
5. Tingginya harga pakan tidak sebanding dengan nilai harga jual ikan
6. Masih rendahnya kualitas, kuantitas dan keragaman produk olahan Kelautan dan Perikanan yang bernilai tambah
7. Terjadinya fluktuasi harga sehingga berpengaruh terhadap nelayan dan pembudidaya ikan

Melihat dari permasalahan yang dihadapi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur maka upaya yang dilakukan adalah:

1. Meningkatkan akurasi data setiap tahun (dengan membuat buku statistik perikanan secara berkelanjutan)
2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan teknis budidaya ikan.
3. Pemberian bantuan sarana dan prasarana bagi pembudidaya ikan.
4. Pemberian bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan bagi nelayan
5. Memberikan pelatihan dan pendampingan kepada pembudidaya ikan tentang cara pembuatan pakan
6. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada kelompok pengolah dan pemasar
7. Diperlukan kontribusi dan koordinasi instansi terkait dalam penetapan daftar harga patokan awal.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Menyajikan secara ringkas tugas, fungsi dan wewenang organisasi, aspek strategis organisasi, data organisasi, permasalahan dan solusi serta sistematika penyajian.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Menyajikan rencana strategis tahun 2019-2023 dan perjanjian kinerja 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

Menyajikan simpulan kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kelautan dan Perikanan tahun 2023 dan langkah-langkah peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

BAB IV. PENUTUP

Menyajikan simpulan menyeluruh dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan tahun dan strategi peningkatan kinerja pada tahun berikutnya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Pembangunan Lombok Timur pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 tentunya akan menuntut perhatian lebih, karena tidak hanya untuk melanjutkan hal-hal yang belum terselesaikan, juga dalam rangka melaksanakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2005 - 2025, dan tentunya juga untuk mengantisipasi perubahan yang muncul dimasa yang akan datang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 ini, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isu yang bersifat nasional dan global, seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang. Dengan mempertimbangkan Visi, Misi, sasaran pokok dan tahapan pembangunan jangka panjang daerah, potensi, permasalahan, isu strategis, peluang dan tantangan pembangunan, sertavisi, misi dan arah pembangunan jangka jangka menengah nasional, maka dirumuskan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten Lombok Timur tahun 2018-2023 sebagai mana diuraikan berikut:

a. Visi

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 adalah:

“Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman”

Lombok Timur Adil: bermakna perlakuan terhadap masyarakat di Kabupaten Lombok Timur tidak berat sebelah kepada satu golongan tertentu, karena semuanya tergantung pada aspek kebenaran, kebaikan dan kepatutan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Lombok Timur Sejahtera: bermakna pembangunan di Kabupaten Lombok Timur memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Lombok Timur Aman: bermakna bahwa pembangunan dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak difabel dan masyarakat miskin.

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi Lombok Timur yang Adil, Sejahtera dan Aman, ditetapkan 6 (Enam) misi pembangunan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2018-2023 sebagai berikut:

- Misi 1 Membangun dan meningkatkan infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, energi, irigasi, air bersih serta perumahan.
- Misi 2 Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdayasaing dengan biaya terjangkau.
- Misi 3 Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.
- Misi 4 Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan social, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan olah raga.
- Misi 5 Menciptakan keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religious.
- Misi 6 Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik.

Dengan mengacu pada tahapan-tahapan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJMD) Kabupaten Lombok Timur (2018-2023) telah ditetapkan visi dan misi pembangunan daerah yang merupakan harapan masa depan guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera

Tujuan, sasaran dan kebijakan umum RPJMD 2018-2023 dijabarkan dalam 6 (Enam) misi. Misi RPJMD 2018-2023 yang terkait dengan pembangunan kelautan dan perikanan terdapat pada misi 3, yaitu:

Misi 3 Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan, kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.

B. Rencana Strategis (RENSTRA)

Rencana Strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2019-2023 merupakan dokumen perencanaan yang memuat Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan.

1. Pernyataan VISI

Visi dan misi pembangunan yang diusung oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Lombok Timur periode 2018 – 2023 adalah **“Lombok Timur Yang Adil Sejahtera dan Aman”**

Lombok Timur Adil: bermakna perlakuan terhadap masyarakat di kabupaten Lombok Timur tidak berat sebelah kepada satu golongan tertentu, karena semuanya tergantung pada aspek kebenaran, kebaikan dan kepatuhan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keagamaan dan kemanusiaan.

Lombok Timur Sejahtera: bermakna pembangunan di Kabupaten Lombok Timur memperhatikan kualitas sumber daya manusia dan keberpihakan kepada kelompok masyarakat yang termarginalkan dalam pembangunan yang berkelanjutan.

Lombok Timur Aman: bermakna bahwa pembangunan dengan memberikan rasa aman kepada masyarakat terutama kaum perempuan, anak difabel dan masyarakat miskin.

2. Pernyataan MISI

Dalam rangka Mewujudkan Visi untuk membangun Kabupaten Lombok Timur di tetapkan 6 (Enam) Misi Pembangunan Kabupaten Lombok Timur 2019-2023, yang terkait dengan pembangunan Kelautan dan Perikanan terdapat pada Misi ke tiga yaitu: Menumbuh kembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, peternakan, perdagangan, perikanan dan kelautan, pariwisata dan sumberdaya lainnya.

3. Tujuan

a. Meningkatkan Produksi Perikanan

4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur adalah Meningkatnya Produksi Kelautan dan Perikanan yang merupakan ukuran kinerja utama pencapaian dari tujuan dan mencerminkan berfungsinya outcome dari semua program yang telah ditetapkan, yaitu:

a. Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap

b. Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya

c. Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan

5. Indikator Kinerja Utama

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi secara makro adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Sektor kategori/lapangan usaha Kelautan dan Perikanan memberi kontribusi terhadap pembentukan PDRB baik atas Dasar Harga Konstan maupun Harga Berlaku. Dukungan PDRB dari sektor perikanan berasal dari Produksi Kelautan dan Perikanan. Untuk mendukung kontribusi terhadap PDRB, Dinas Kelautan dan Perikanan menjadikan Indikator Kinerja Utama yang kemudian dijabarkan dalam suatu indikator kinerja yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan dan berjangka waktu. Hanya dengan indikator kinerja yang memenuhi kelima karakteristik kualitatif inilah keberhasilan pencapaian program dan kegiatan nantinya dapat dilakukan. Keberhasilan program diukur dengan indikator hasil (Outcome), sedangkan keberhasilan kegiatan diukur dengan menggunakan indikator keluaran (Output).

Penetapan indikator program dilakukan dengan mempertimbangkan tujuan program dan kegiatan yang mendukung program tersebut. Indikator kinerja utama Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur adalah:

Tabel 6. Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Formula/Penjelasan	Sumber Data
1.		Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	%	0,89	Produksi Tahun Sekarang – Produksi Tahun Sebelumnya dibagi Produksi Tahun Sebelumnya	Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	Ton	50	16.450 Ton – 16.400 Ton Penjelasan: Target Produksi Perikan Tangkap Tahun Ini Dikurangi Target Produksi Perikanan Tangkap Tahun Sebelumnya	Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	Ton	500	45.792 Ton – 45.292 Ton Penjelasan: Target Produksi Perikan Budidaya Tahun Ini Dikurangi Target Produksi Perikanan Budidaya Tahun Sebelumnya	Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Timur
4.	Meningkatnya Produksi Olahan Hasil	Peningkatan Produksi Olahan Hasil	Ton	1.202	52.987 Ton – 51.785Ton Penjelasan: Target Produksi Olahan	Dinas Kelautan dan Perikanan

	Perikanan	Perikanan			Hasil Perikanan Tahun Ini Dikurangi Target Produksi Olahan Hasil Perikanan Tahun Sebelumnya	Lombok Timur
--	-----------	-----------	--	--	---	--------------

C. PERJANJIAN KINERJA ESLON II

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil. Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.Lombok Timur tahun 2023 merupakan bentuk Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dengan Bupati Lombok Timur.

Perjanjian Kinerja tersebut berisi kesanggupan untuk mewujudkan target kinerja tahunan dan pertanggungjawaban atas keberhasilan maupun kegagalan.

Target sasaran program dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2023.

No.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
-1	-2	-3	-4
1.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Terawat dan Berfungsi Baik untuk Mendukung Pelaksanaan Program	100%
		Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	16.450 Ton (Peningkatan 50 ton)
		Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	45.792 Ton (Peningkatan 500 ton)
		Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	52.987 Ton (Peningkatan 1.202 ton)

D. Program dan Kegiatan

Program Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan penjabaran dari kebijakan sesuai Visi dan Misi Kabupaten Lombok Timur, yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur. Kegiatan ini sekaligus penjabaran tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan sasaran strategis yang telah ditetapkan sebelumnya. Program Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2023 sebanyak 3 Program teknis dan 1 Program Penunjang yang termasuk didalam anggaran dana alokasi umum dan dana alokasi khusus (DAU/DAK).

a. Program Teknis (DAU/DAK):

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

3. Program Pengolahan dan Pemasaran hasil Perikanan

b. Program Penunjang (DAU/DAK):

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Adapun kegiatan teknis yang dilaksanakan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 sebanyak 7 kegiatan dan 10 sub kegiatan teknis antara lain adalah:

1. Kegiatan pengelolaan penangkapan ikan di wilayah sungai, danau, waduk, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan penyediaan data dan informasi sumberdaya ikan
2. Kegiatan Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pengembangan kapasitas nelayan kecil
3. Kegiatan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
 - Sub Kegiatan Pelayanan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)
4. Kegiatan Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil
 - Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
5. Kegiatan pengelolaan pembudidaya ikan
 - Sub Kegiatan penyediaan prasarana pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Penjaminan ketersediaan sarana pembudidayaan ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
6. Kegiatan pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan bagi usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
 - Sub Kegiatan pelaksanaan bimbingan dan penerapan persyaratan atau standar pada usaha pengolahan dan pemasaran skala mikro dan kecil
7. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan ikan dalam 1 (Satu) Daerah kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Kegiatan Penunjang sebanyak 7 kegiatan dan 16 sub kegiatan antara lain adalah:

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

- Sub Kegiatan pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi keuangan SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan penatausahaan barang milik daerah pada SKPD
 4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
 - Sub Kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Sub Kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga
 - Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - Sub Kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
 5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan peralatan dan mesin lainnya
 6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan penyediaan jasa surat menyurat
 - Sub Kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
 - Sub Kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor
 7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Sub Kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan
 - Sub Kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Sub Kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program kebijakan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi. Kerangka Pengukuran kinerja berupa indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk mencapai sasaran yang diinginkan dan bersifat nyata serta terukur.

Keberhasilan atas Dukungan PDRB dari sektor perikanan dapat diukur dari peningkatan atau penurunan jumlah produksi perikanan. Sasaran strategis dinas kelautan dan perikanan sebagai pendukung keberhasilan PDRB antara lain jumlah produksi perikanan tangkap, jumlah produksi perikanan budidaya dan jumlah produksi olahan hasil perikanan. Selanjutnya untuk mengetahui keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, maka dapat diukur capaian sasaran dengan indikator sasaran dan capaian kegiatan dengan indikator kinerja, yaitu:

1. Membandingkan antara target dan relisasi kinerja tahun 2023 (IKK, IKU Perangkat Daerah dan PK Eslon II)

Berdasarkan pada penetapan kinerja tahun 2023 dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD dan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2019 - 2023, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam pengukuran dan capaian keberhasilan pembangunan bidang Kelautan dan Perikanan menetapkan indikator kinerja berupa peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Dalam tahun 2023 melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berikut akan dijelaskan mengenai tingkat capaian target dengan realisasi yang dicapai selama satu tahun oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sebagai berikut:

Tabel 8. Pencapaian Kinerja Poduksi Perikanan Tahun 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan				
	Tujuan : Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	0,89 %	7,67%	

Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	16.450 Ton (Peningkatan 50 ton)	25.311,65 Ton (Peningkatan 76,94 Ton)	153,87 %
Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	45.792 Ton (Peningkatan 500 ton)	63.403,47 Ton (Peningkatan 3.215,73 Ton)	138,46 %
Sasaran : Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	51.785 Ton (Peningkatan 1.202 ton)	54.468,42 Ton (Peningkatan 83,44 Ton)	102,80 %

Target produksi perikanan tangkap dan perikanan budidaya tahun 2023 sebesar 62.242 ton dan realisasi sebesar 88.715,12 ton dengan persentase Produksi Perikanan sebesar 142,53 %, dengan rincian target produksi Perikanan Tangkap tahun 2023 sebesar 16.450 ton dengan realisasi sebesar 25.311,65 ton (153,87 %). Sedangkan target produksi Perikanan Budidaya sebesar 45.792 ton dengan realisasi sebesar 63.403,47 ton (138,46 %), dan target produksi Olahan Hasil Perikanan tahun 2023 sebesar 51.785 ton dan realisasi sebesar 54.468,42 ton (102,80 %). Persentase peningkatan produksi perikanan sebesar 0,04 %.

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir terhadap IKK, IKU Perangkat Daerah dan PK Eselon II.

Sebagai sebuah proses dari akuntabilitas, serta pengukuran dari kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 maka dijabarkan sebuah tabel perbandingan capaian kinerja antara tahun 2021, 2022 dan tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 9. Perbandingan Reallisasi Kinerja tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 semester satu.

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Capaian (Tahun)			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RENSTRA
			2021 (Ton)	2022 (Ton)	2023 (Ton)	
			Realisasi	Realisasi	Realisasi	
					Target Akhir	

A.	Produksi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Olahan Hasil Perikanan	Ton	121.308,70	139.807,43	143.183,54	611.845,36
1.	Produksi Perikanan Tangkap	Ton	24.196,53	25.234,98	25.311,65	114.042,78
2.	Produksi Perikanan Budidaya	Ton	42.749,65	60.187,74	63.403,47	242.609,66
3.	Produksi Perikanan Budidaya dan Olahan Hasil Perikanan	Ton	54.362,52	54.384,98	54.468,42	255.192,92

Capaian produksi perikanan pada tahun 2023 sebesar 143.183,54 ton (124,26%) dan target produksi sebesar 115.229 ton. Rincian produksi tahun 2023 yaitu realisasi produksi perikanan tangkap sebesar 25.311,65 ton (153,87%) dari target produksi sebesar 16.450 ton, realisasi produksi perikanan budidaya sebesar 63.403,47 (138,46) dengan target sebesar 45.792 dan realisasi produksi Olahan Hasil Perikanan sebesar 54.468,42 ton (102,89%) dengan target 52.987 ton. Persentase produksi perikanan rata – rata per bidang lebih dari 100%, sehingga bisa dipastikan realisasi produksi perikanan melebihi target tahun 2023. Pencapaian kinerja tersebut merupakan keberhasilan yang tidak terlepas dari kerja tim Dinas Kelautan dan Perikanan dalam penyaluran bantuan – bantuan tepat sasaran dan termanfaatkan.

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi terhadap IKK, IKU Perangkat Daerah dan PK Eselon II.

Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2023 dengan target jangka menengah Renstra 2018 – 2023 di jabarkan pada table sebagai berikut:

Tabel 10. Perbandingan realisasi kinerja pada tahun 2022 dan 2023 semester satu dengan target jangka menengah Renstra 2019 – 2023

No	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah (Ton)					Realisasi Kinerja (Ton)	
		Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun	Tahun
		2019	2020	2021	2022	2023	2022	2023
A.	Produksi Perikanan Tangkap, Perikanan Budidaya dan Olahan Hasil Perikanan	60.042	60.592	111.761	113.477	115.229	139.807,43	143.183,54
1.	Produksi Perikanan Tangkap	16.250	16.300	16.350	16.400	16.450	25.234,71	25.311,65

2.	Produksi Perikanan Budidaya	43.792	44.292	44.792	45.292	45.792	60.187,74	63.403,47
3.	Produksi Perikanan Budidaya dan Olahan Hasil Perikanan	-	-	50.619	51.785	52.987	54.384,98	54.468,42

Dari data diatas dapat dilihat bahwa persentase terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya dan melebihi target RENSTRA. Pencapaian produksi perikanan selama tahun 2023 sudah melebihi target.

4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2023 sesuai dengan perjanjian kinerja yang telah ditetapkan memiliki indikator kinerja sebagai tolok ukur pengukuran hasil kinerja baik itu kegagalan maupun keberhasilan. Indikator Kinerja yang telah ditetapkan. Pada tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur produksi perikanan selama satu tahun sebesar 143.183,54 ton (124,26%) dari target produksi tahun 2023 sebesar 115.229 ton, dengan rincian produksi perikanan tangkap dari target sebesar 16.450 ton dengan realisasi produksi sebesar 25.311,65 ton (153,87%), perikanan budidaya dari target 45.292 ton dengan realisasi produksi sebesar 63.403,47 ton (138,46%) dan produksi olahan hasil perikanan dari target sebesar 51.785 ton dengan realisasi sebesar 54.468,42 ton (102,80%). Semua indikator kinerja sudah melebihi target RENSTRA tahun 2023 dilihat dari persentase produksi selama satu tahun. Pencapaian target indikator kinerja selain adanya bantuan sarana dan prasarana perikanan dari pemerintah juga telah dilakukan beberapa inovasi yang dapat meningkatkan kapasitas pelaku usaha perikanan antara lain pelatihan pemeliharaan mesin kentinting kepada nelayan, pelatihan pembuatan pakan mandiri untuk pembudidaya ikan dan pelatihan pengolahan ikan yang lebih ekonomis (pembuatan potato ikan, roti gulung abon ikan dll).

5. Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya

- a. Anggaran

Dalam penetapan target kinerja tahun 2023, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur melakukan efisiensi penggunaan sumberdaya semaksimal mungkin diantaranya adanya penghematan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja pembangunan kelautan dan perikanan serta memaksimalkan sumberdaya manusia yang jumlahnya sangat terbatas guna

mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Pada tahun 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur memiliki anggaran APBD antara lain belanja tidak langsung dan belanja langsung dalam sektor kelautan dan perikanan sebesar Rp. 16.333.882.090,- dengan realisasi keuangan selama tahun 2023 sebesar Rp. 14.474.516.339 (88,62%) dan realisasi fisik (99,14%) sisa anggaran sebesar Rp. 1.859.365.751,-. Anggaran yang tersisa merupakan Hutang Jatuh Tempo (HUJAT) sebesar Rp. 1.669.103.500,- dan kontrak. Pencapaian Kinerja Dinas Kelautan dan Perikanan hampir 100%.

b. Sumber Daya Manusia

Keberhasilan pencapaian kinerja tahun 2023 didukung oleh ketersediaan sumberdaya manusia yang memiliki kemampuan dan pengalaman dalam peningkatan produksi Perikanan. SDM yang ada merupakan Karyawan/Karyawati Dinas Kelautan Perikanan, Penyuluh Perikanan dan Pelaku Usaha Perikanan. Penyuluh Perikanan merupakan tenaga teknis lapangan yang terus menerus melakukan pembinaan dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat perikanan. Peningkatan pengetahuan pelaku usaha perikanan merupakan faktor utama dalam keberhasilan target kinerja yang di tentukan, karena tanpa keyakinan dan kemauan pelaku usaha maka target yang di harapkan akan sulit tercapai. Penyuluh Perikanan tersebut tersebar di hampir semua kecamatan se-Lombok Timur yang memiliki potensi perikanan, sehingga mempermudah koordinasi antara Dinas Kelautan dan Perikanan dengan Pelaku Usaha Perikanan. Jumlah karyawan/Karyawati Dinas Kelautan dan Perikanan PNS 21 orang, PPPK 2 orang, sedangkan jumlah Penyuluh Perikanan se-Lombok Timur sebanyak 23 orang dengan status 16 orang PNS, 1 orang PPPK dan 7 orang Penyuluh Bantu, sedangkan jumlah Nelayan Lombok Timur sebanyak 13.712 orang dan Jumlah Pembudidaya Ikan sebanyak 5.586 RTP.

6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 memiliki 4 program yang terdiri dari 3 program teknis dan 1 program penunjang yang berasal dari DAU/DAK dan 14 kegiatan. Program kegiatan yang dilaksanakan tersebut menunjang dalam pencapaian indikator kinerja utama dimana program-program yang dimiliki berefek langsung dalam pencapaian target kinerja yaitu Program Pengelolaan Perikanan Tangkap, Program Pengelolaan Perikanan Budidaya,

Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang merupakan program teknis, dimana ke 3 program ini sangat mendukung pada pencapaian indikator penunjang produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya, olahan hasil perikanan.

B. REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara, dimana Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai pengguna anggaran mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan kepada Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinya.

Akuntabilitas keuangan merupakan sarana pengukuran dalam alokasi dana yang mendukung pencapaian sasaran dengan indikator sasaran program dan pencapaian kegiatan dengan indikator kinerja meliputi output dan outcome.

Selanjutnya Dinas Kelautan Kabupaten Lombok Timur tahun anggaran 2023 telah melaksanakan program kegiatan yang sumber dana berasal dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebanyak 4 program dan 14 kegiatan dan 24 sub kegiatan dengan jumlah Anggaran Belanja sebesar Rp. 16.333.882.090,- dari belanja Pegawai sebesar Rp. 2.276.040.050,- dan belanja Non Gaji/Program dan Kegiatan sebesar Rp. 14.057.842.040,- dengan realisasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 14.474.516.339,- dengan persentase capaian keuangan sebesar 88,62 % dan persentase fisik sebesar 99,14 %. Kendala yang dihadapi adalah masih ada pekerjaan yang menjadi hutang jatuh tempo (HUJAT) dan honor – honor pejabat tidak terbayarkan di tahun 2023 , sehingga realisasi keuangan tidak bias mencapai 100%. Adapun rincian program kegiatan dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 11. Realisasi Anggaran Semester satu tahun 2023

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.153.502.490	3.012.332.639	95,52	95,52
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.959.800	118.959.800	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.959.800	118.959.800	100	100
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.385.293.190	2.300.816.444	96,46	96,46

	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.185.440.050	2.139.133.361	97,88	97,88
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	199.853.140	161.683.083	80,90	80,9
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.596.100	9.496.100	98,96	98,96
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.596.100	9.496.100	98,96	98,96
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.972.200	95.069.789	94,15	94,15
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	936.000	936.000	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.344.100	23.344.100	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.506.000	1.758.600	70,18	70,18
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.028.100	7.691.600	76,70	76,70
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.158.000	61.339.489	95,61	95,61
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.150.000	86.650.000	92,03	92,03
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.150.000	86.650.000	92,03	92,03
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.598.700	194.684.754	98,03	98,03
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.148.700	63.028.700	99,81	99,81
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	34.200.000	30.406.054	88,91	88,91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.250.000	101.250.000	100	100
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.932.500	206.655.752	84,03	84,03
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.902.500	64.625.752	85,14	85,14
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	2.030.000	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	168.000.000	140.000.000	83,33	100,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.992.417.500	6.156.176.000	76,94	100,00
a	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.800.000	19.800.000	100	100
	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	19.800.000	19.800.000	100	100,00
b	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam daerah Kabupaten/Kota	6.644.215.500	6.078.526.000	91,49	100

	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	6.644.215.500	6.078.526.000	91,49	100,00
c	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	328.402.000	57.850.000	70	100
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	328.402.000	57.850.000	17,62	100,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.993.163.100	4.144.738.700	83,01	100,00
a	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	25.486.700	25.486.700	100	100
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	25.486.700	25.486.700	100	100
	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	0	0		
b	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	4.967.676.400	4.119.252.000	82,92	100
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.649.952.000	3.890.944.000	83,68	100
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	317.724.400	228.308.000	71,86	100
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.194.799.000	1.161.269.000	83,44	100
a	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.809.000	40.809.000	100	100
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.809.000	40.809.000	100	100
b	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.153.990.000	1.120.460.000	97,09	100
	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.153.990.000	1.120.460.000	97,09	100
	JUMLAH TOTAL	16.333.882.090	14.474.516.339	88,62	99,14

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur tahun 2023 merupakan media akuntabilitas yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi dan pengukuran kinerja pemerintah Kabupaten Lombok Timur.

Tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur sebagai pelaksana kewenangan daerah dalam rangka desentralisasi bidang Kelautan dan Perikanan dilaksanakan melalui Rencana Strategis dan rencana kerja tahun 2023 yang memuat indikator kinerja masing-masing kegiatan dan sasaran. Dari hasil akuntabilitas kinerja yang tertuang dalam form pencapaian sasaran serta penetapan kinerja diketahui bahwa hasil capaian kinerja organisasi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dari indikator kinerja yang telah ditetapkan yaitu : Indikator prosentase peningkatan produksi perikanan tangkap, perikanan budidaya dan peningkatan produksi olahan hasil perikanan diperkirakan dapat mencapai hasil sesuai dengan yang ditargetkan. Realisasi produksi tahun 2023 yaitu sebesar 143.183,54 ton (124,25), sudah melebihi target tahun 2023 sebesar 113.477 ton.

B. Saran

Dengan penguatan kelembagaan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur serta agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama saling mendukung antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur dalam bentuk:

1. Koordinasi antar instansi terkait atau koordinasi lintas sektoral yang sudah berjalan perlu dipertahankan dan ditingkatkan dalam hal koordinasi dan kerjasama dimasa mendatang.
2. Dukungan pihak legislatif agar sasaran dan program Dinas dapat diselenggarakan dengan baik, terarah serta mencapai sasaran yang diinginkan.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Timur Tahun 2023 (DAU/DAK)

No.	Uraian Kegiatan	Anggaran	Realisasi		Fisik (%)
			Rp.	%	
1	2	3	4	5	6
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.153.502.490	3.012.332.639	95,52	95,52
a	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	118.959.800	118.959.800	100	100
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	118.959.800	118.959.800	100	100
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.385.293.190	2.300.816.444	96,46	96,46
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.185.440.050	2.139.133.361	97,88	97,88
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	199.853.140	161.683.083	80,90	80,9
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	9.596.100	9.496.100	98,96	98,96
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	9.596.100	9.496.100	98,96	98,96
d	Administrasi Umum Perangkat Daerah	100.972.200	95.069.789	94,15	94,15
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	936.000	936.000	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	23.344.100	23.344.100	100,00	100,00
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.506.000	1.758.600	70,18	70,18
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	10.028.100	7.691.600	76,70	76,70
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	-
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	64.158.000	61.339.489	95,61	95,61
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	94.150.000	86.650.000	92,03	92,03
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	94.150.000	86.650.000	92,03	92,03
f	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	198.598.700	194.684.754	98,03	98,03
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	63.148.700	63.028.700	99,81	99,81
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	34.200.000	30.406.054	88,91	88,91
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	101.250.000	101.250.000	100	100
g	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.932.500	206.655.752	84,03	84,03

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	75.902.500	64.625.752	85,14	85,14
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.030.000	2.030.000	100	100
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	168.000.000	140.000.000	83,33	100,00
2	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	6.992.417.500	6.156.176.000	76,94	100,00
a	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	19.800.000	19.800.000	100	100
	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	19.800.000	19.800.000	100	100,00
b	Pemberdayaan Nelayan Kecil Dalam daerah Kabupaten/Kota	6.644.215.500	6.078.526.000	91,49	100
	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	6.644.215.500	6.078.526.000	91,49	100,00
c	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	328.402.000	57.850.000	70	100
	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	328.402.000	57.850.000	17,62	100,00
3	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	4.993.163.100	4.144.738.700	83,01	100,00
a	Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	25.486.700	25.486.700	100	100
	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	25.486.700	25.486.700	100	100
	Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudidaya Ikan Kecil	0	0		
b	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	4.967.676.400	4.119.252.000	82,92	100
	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	4.649.952.000	3.890.944.000	83,68	100
	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	317.724.400	228.308.000	71,86	100
4	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	1.194.799.000	1.161.269.000	83,44	100
a	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.809.000	40.809.000	100	100
	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	40.809.000	40.809.000	100	100
b	Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.153.990.000	1.120.460.000	97,09	100

	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
	Pemberian Fasilitas Bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	1.153.990.000	1.120.460.000	97,09	100
	JUMLAH TOTAL	16.333.882.090	14.474.516.339	88,62	99,14

**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH**

Satuan Kerja Perangkat Daerah : Dinas Kelautan dan Perikanan
Tahun Anggaran : 2023

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
1.	IKU Dinas Kelautan dan Perikanan				
	Tujuan : Meningkatkan Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan	0,89 %	7,67%	
	Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	16.450 Ton (Peningkatan 50 ton)	25.311,65 Ton (Peningkatan 76,94 Ton)	153,87 %
	Sasaran : Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	45.792 Ton (Peningkatan 500 ton)	63.403,47 Ton (Peningkatan 3.215,73 Ton)	138,46 %
	Sasaran : Meningkatnya Produksi Olahan Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	51.785 Ton (Peningkatan 1.202 ton)	54.468,42 Ton (Peningkatan 83,44 Ton)	102,80 %

Lampiran 4. Pencapaian Kinerja Keuangan

SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan

Tahun Anggaran : 2023

No.	PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			ANGGARAN	REALISASI		Fisik (%)
		URAIAN	TARGET	REALISASI		Rp.	%	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan yang Terawat dan Berfungsi Baik Untuk Mendukung Pelaksanaan Program	100%	95,52%	3.153.502.490	3.012.332.639	95,52	95,52
1.	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi Kegiatan	100%	100%	118.959.800	118.959.800	100	100
	a. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 laporan	3 laporan	118.959.800	118.959.800	100	100

2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Penatausahaan Keuangan Sesuai Rencana	100%	96,46	2.385.293.190	2.300.816.444	96,46	96,46	
	a.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	325 orang/bulan	255 orang/bulan	2.185.440.050	2.139.133.361	97,88	97,88
	b.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	3 dokumen	3 dokumen	199.853.140	161.683.083	80,90	80,9
3.	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan Aset barang milik daerah	100%	100%	9.596.100	9.496.100	98,96	98,96	
	a.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	1 Laporan	9.596.100	9.496.100	98,96	98,96
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pengelolaan pelayanan umum perangkat daerah	100%	99,94%	100.972.200	95.069.789	94,15	94,15	
	a.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	8 paket	8 paket	936.000	936.000	100,00	100,00
	b.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	35 Paket	35 Paket	23.344.100	23.344.100	100,00	100,00

	c.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25 Paket	20 Paket	2.506.000	1.758.600	70,18	70,18
	d.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	10.028.100	7.691.600	76,70	76,70
	e.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	75 Laporan	85 Laporan	64.158.000	61.339.489	95,61	95,61
5.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Penyelesaian Pengadaan Asset Direncanakan	100%	92,03%	94.150.000	86.650.000	92,03	92,03
	a.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 unit	5 unit	94.150.000	86.650.000	92,03	92,03
6.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan	100%	98,03%	198.598.700	194.684.754	98,03	98,03
	a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	1 Laporan	63.148.700	63.028.700	99,81	99,81
	b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	34.200.000	30.406.054	88,91	88,91
	c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 Laporan	1 Laporan	101.250.000	101.250.000	100	100

7.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	84,14%	245.932.500	206.655.752	84,03	84,03
	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	38 unit	24 unit	75.902.500	64.625.752	85,14	85,14
	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	8 unit	8 unit	2.030.000	2.030.000	100	100
	c. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 unit	2 unit	168.000.000	140.000.000	83,33	100,00
II.	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	16.450 Ton	25.311,65 Ton	6.992.417.500	6.156.176.000	76,94	100,00
1.	Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya data sumber daya ikan	100%	100%	19.800.000	19.800.000	100	100

	a.	Penyediaan Data dan Informasi Sumberdaya Ikan	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	1 dokumen	1 dokumen	19.800.000	19.800.000	100	100,00
2.		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan kepada masyarakat	100%	100%	6.644.215.500	6.078.526.000	91,49	100
	a.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya	450 orang	475 orang	6.644.215.500	6.078.526.000	91,49	100,00
3.		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Pelaksanaan pelayanan TPI	100%	100%	328.402.000	57.850.000	17,62	100
	a.	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	3 layanan	3 layanan	328.402.000	57.850.000	17,62	100,00
III.		Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	45.792 Ton	63.403,47 Ton	4.993.163.100	4.144.738.700	83,01	100,00
1.		Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	Persentase jumlah kelompok yang di bina	100%	100%	25.486.700	25.486.700	100	100
	a.	Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/ Kota yang Tersedia	100 kelompok	100 kelompok	25.486.700	25.486.700	100	100

2.	Pengelolaan Pembudidaya Ikan	Persentase penyaluran bantuan sarana dan prasarana pembudidaya ikan kepada masyarakat	100%	100%	4.967.676.400	4.119.252.000	82,92	100
a.	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40 unit	38 unit	4.649.952.000	3.890.944.000	83,68	100
b.	Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	5 unit	6 unit	317.724.400	228.308.000	71,86	100
IV.	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Peningkatan Produksi Olahan Hasil Perikanan	51.785 ton	54.468,42 ton	1.194.799.000	1.161.269.000	83,44	100
1.	Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Persentase jumlah kelompok pengolah dan pemasar (Poklahsar) yang di bina	100%	90,20%	40.809.000	40.809.000	100	100
a.	Pelaksanaan Bimbingan dan Penerapan Persyaratan atau Standar pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko	100 unit usaha	100 unit usaha	40.809.000	40.809.000	100	100

2.	Penyediaan dan Penyaluran bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyaluran bantuan sarana dan prasarana Pengolahan ikan kepada masyarakat	100%	97,09%	1.153.990.000	1.120.460.000	97,09	100
a.	Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi	4 pelaku usaha	4 pelaku usaha	1.153.990.000	1.120.460.000	97,09	100
JUMLAH					16.333.882.090	14.474.516.339	88,62	99,14

Selong, 24 Januari 2024

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN LOMBOK TIMUR



M.ZAINUDDIN, S.Pi.M.Si
NIP. 197607012009011005
Pembina Tk.I (IV/b)

